

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Mataram merupakan ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di pulau Lombok. Kota Mataram merupakan tempat pusat kegiatan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Mataram terletak diantara kabupaten di pulau Lombok, dengan letak yang strategis, Kota Mataram dijadikan pusat kegiatan dan pusat perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk menunjang perekonomian dan kelancaran kegiatan di Kota Mataram diperlukan perencanaan transportasi yang teratur, hal tersebut penting direalisasikan guna terciptanya sarana transportasi yang aman, nyaman, dan efisien untuk penggunaannya. Di tengah kemajuan transportasi, Kota Mataram dihadapkan dengan permasalahan kemacetan lalu lintas pada saat saat tertentu. Hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi dan ketergantungan masyarakat Kota Mataram dalam menggunakan kendaraan pribadi yang tinggi. Ketidaklancaran ini menimbulkan waktu yang tertunda, kemacetan, dan biaya yang lebih besar. Dalam hal ini angkutan umum perkotaan seharusnya memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat Kota Mataram.

Dilihat dari kondisi di lapangan, pengguna jalan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal ini diakibatkan kondisi angkutan umum Kota Mataram saat ini belum layak dan belum sesuai dengan standar pelayanan minimal angkutan (PM No 98 Tahun 2013 Tentang SPM Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek). Hal ini terlihat pada hasil analisis Praktik Kerja Lapangan di Kota Mataram 2023 bahwa hanya 2% masyarakat yang memanfaatkan pelayanan angkutan penumpang umum. Dominasi dari 2% masyarakat tersebut adalah lanjut usia. Para pengguna angkutan umum tidak mendapatkan pelayanan yang baik untuk terciptanya rasa aman dan nyaman. Berdasarkan data di lapangan angkutan umum perkotaan yang beroperasi hanya ada satu trayek, sedangkan

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2000 Kota Mataram mempunyai tiga belas trayek angkutan perkotaan.

Permasalahan di Kota Mataram berdasarkan parameter kinerja pelayanan angkutan perkotaan yang mudah diukur oleh masyarakat antara lain ditinjau dari kondisi fisik angkutan perkotaan yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat dengan umur kendaraan rata-rata 26 tahun, waktu tunggu antar kendaran yang lama mencapai 22 menit yaitu, hal tersebut dikarenakan tidak adanya penjadwalan yang teratur dan menganut sistem sopir yang menunggu penumpang, bukan sebaliknya, rendahnya tingkat load factor pada layanan trayek angkutan perkotaan sebesar 9%, tingginya penyimpangan trayek angkutan perkotaan hingga 44% (Tim PKL Kota Mataram 2023). Dengan kondisi pelayanan angkutan perkotaan yang terus menurun dan manajemen angkutan perkotaan yang kurang modern menyebabkan angkutan perkotaan kurang bersaing dengan kendaraan sewa yang berbasis dalam jaringan dengan informasi tarif, rute, dan jadwal yang mudah di akses.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan tersebut, pemerintah Kota Mataram sudah saatnya untuk mengembangkan angkutan umum massal di Kota Mataram. Angkutan umum massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan bus dengan kapasitas angkut massal dan di lengkapi dengan jalur khusus (PM No 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek). Kebijakan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan transportasi di Kota Mataram yaitu dengan menerapkan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dengan harapan bisa mengatasi permasalahan transportasi yang ada. *Bus Rapid Transit* telah diterapkan di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Lampung, Solo Yogyakarta, Bandung, dan Kota besar lainnya. Pembangunan transportasi berkelanjutan melalui pengembangan angkutan umum massal yang terpadu *Bus Rapid Transit* (BRT) adalah kunci utama dalam menjawab permasalahan transportasi di setiap kota di Indonesia (Riawan, 2018). Keberhasilan pengimplementasian *Bus Rapid Transit* di berbagai wilayah ini

memicu untuk membuat perencanaan *Bus Rapid Transit* (BRT) di kota besar maupun Kota Kecil. Dengan kondisi wilayah dan administrasi Kota Mataram yang tergolong Kota Kecil. Pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Mataram dapat menerapkan *Bus Rapid Transit* seperti halnya di kota besar. Hal tersebut dapat menjadi alternatif guna mencapai sistem angkutan umum massal yang efektif dan efisien di Kota Mataram. Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau". Pengembangan secara berkelanjutan dari angkutan umum ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat untuk memenuhi akses kawasan bangkitan dan tarikan perjalanan. Dalam hal ini, upaya pengelolaan dan pengembangan angkutan umum di Kota Mataram diperlukan kegiatan studi tentang Perencanaan *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram.

1.2 Identifikasi Masalah

Meninjau dari latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penggunaan moda angkutan umum masyarakat Kota Mataram sebesar 2%. (Hasil Analisis Tim PKL Kota Mataram 2023)
2. Parameter pelayanan angkutan umum yang mudah diukur oleh masyarakat adalah kondisi fisik armada angkutan umum yang masih belum adanya peremajaan terhadap armadanya (Standar PM 98 Tahun 2013 (20 Tahun).
3. Pelayanan kinerja operasional angkutan umum masih buruk, seperti waktu tunggu antar angkutan yang tinggi (standar 5-10 menit SK 687 tahun 2002), rendahnya load factor (<70%) standar World Bank (1986).
4. Trayek angkutan umum yang beroperasi hanya satu trayek dari tiga belas trayek berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14 Tahun 2000 Kota Mataram.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah setelah meninjau identifikasi masalah di atas, yaitu:

1. Bagaimana pola pergerakan masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum di Kota Mataram?
2. Berapa perkiraan pengguna *Bus Rapid Transit* yang sesuai dengan pengoperasian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Bus Rapid Transit di Kota Mataram serta jenis armadanya?
3. Bagaimana kinerja operasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pelayanan *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram?
4. Berapa Besaran Biaya Operasional Kendaraan dan penetapan tarif yang sesuai dengan sistem pengoperasian *Bus Rapid Transit* ?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan perencanaan pengoperasian sistem *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pola pergerakan masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum di Kota Mataram.
2. Menentukan jenis kendaraan dan jumlah armada yang sesuai dengan pengoperasian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram.
3. Menentukan kinerja operasi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas pelayanan *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram.
4. Menghitung Besaran Biaya Operasional Kendaraan dan menetapkan tarif yang sesuai dengan sistem pengoperasian *Bus Rapid Transit* di Kota Mataram.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Lokasi studi yang diambil wilayah Kota Mataram
2. Analisis pengoperasian *Bus Rapid Transit* yang akan dikaji tidak membahas
 - a. Kebutuhan desain halte yang sesuai dalam perencanaan *Bus Rapid Transit*.
 - b. Kepengusahaan sistem *Bus Rapid Transit*
 - c. Kemampuan masyarakat dalam membayar tarif *Bus Rapid Transit*.
 - d. Pembebanan dalam penentuan rute *Bus Rapid Transit*.